

ABSTRAK

Rizki Mulyana (1225010171): Relasi Ulama dan Negara dalam Pemikiran Politik K.H. Moenawar Chalil (1952-1961)

K.H. Moenawar Chalil merupakan salah satu ulama dan intelektual Muslim Indonesia yang aktif menyuarakan gagasan keislaman dan politik pada masa Demokrasi Liberal tahun 1950-an. Pemikirannya mengenai hubungan antara ulama dan negara menjadi bagian penting dalam wacana politik Islam di Indonesia, terutama dalam merumuskan kedudukan ulama terhadap kekuasaan, batas ketaatan kepada penguasa, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks politik Indonesia pada periode tersebut, perdebatan mengenai agama, negara, syariat, kepemimpinan, dan partisipasi masyarakat berlangsung secara intensif. Oleh karena itu, pemikiran K.H. Moenawar Chalil mengenai relasi ulama dan negara penting dikaji sebagai bagian dari perkembangan sejarah pemikiran politik Islam di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi ulama dan negara dalam pemikiran politik K.H. Moenawar Chalil pada periode 1952–1961. Secara khusus, penelitian ini bertujuan menjelaskan kedudukan dan peran ulama dalam kehidupan bernegara, pandangan mengenai hubungan ulama dengan penguasa, konsep imamah dan *ulil amri*, prinsip syura atau musyawarah, serta gagasan mengenai negara Islam ideal dalam pemikiran K.H. Moenawar Chalil.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan pendekatan historis yang bersifat deskriptif-analitis. Tahapan penelitian meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber primer penelitian berupa tulisan-tulisan K.H. Moenawar Chalil yang diterbitkan dalam berbagai majalah Islam serta karya-karyanya yang berkaitan dengan tema ulama, kepemimpinan, *ulil amri*, syura, dan negara. Sumber-sumber tersebut dianalisis dengan menghubungkan pemikiran K.H. Moenawar Chalil dengan konteks sosial dan politik Islam Indonesia pada dekade 1950-an. Penelitian ini juga menggunakan teori teo-demokrasi Abul A'la Al-Maududi sebagai kerangka analisis untuk memahami hubungan antara kedaulatan Tuhan, partisipasi rakyat, dan pembatasan kekuasaan berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa K.H. Moenawar Chalil menempatkan ulama sebagai otoritas moral dan intelektual yang independen dari kekuasaan politik, tetapi tetap memiliki tanggung jawab untuk memberikan bimbingan, nasihat, kritik, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Ketaatan kepada penguasa menurutnya bersifat kondisional, yaitu berlaku selama pemimpin menjalankan pemerintahan sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam konsep imamah, kepala negara dipandang sebagai pemegang amanah yang bertanggung jawab kepada rakyat sekaligus kepada Allah, sedangkan prinsip syura menjadi mekanisme penting untuk menjamin keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, relasi ulama dan negara dalam pemikiran K.H. Moenawar Chalil bersifat komplementer, yaitu negara menjalankan fungsi politik dan pemerintahan, sementara ulama menjaga nilai-nilai moral dan keagamaan agar kekuasaan tidak menyimpang dari prinsip keadilan, kemaslahatan, dan syariat Islam.